

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA BANK
INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU INFLASI DI
INDONESIA



Diajukan Oleh :

YOVI NOVERIZA

01003120029

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi

2005

S
332.4107

Nov

/

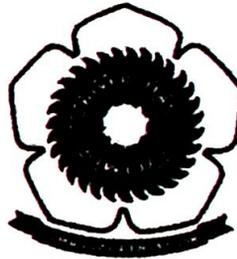
050526

2005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA**



**SKRIPSI
PENGARUH KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA BANK
INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU INFLASI DI
INDONESIA**



R-12174

-12456

Diajukan Oleh :

YOVI NOVERIZA

01003120029

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi**

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA

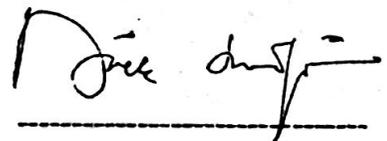
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : YOVI NOVERIZA
NIM : 01003120029
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
MATA KULIAH : EKONOMI MONETER
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA
BANK INDONESIA DALAM MENGENDALIKAN LAJU
INFLASI DI INDONESIA

PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI

Tanggal, Februari 2005

Ketua,



Dr. Didik Suseteyo
NIP. 131 613 869

Tanggal, Februari 2005

Anggota,



Drs. Harunnurasyid, M.Com
NIP. 131 844 026

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

SKRIPSI

~~PENGARUH KEBIJAKAN OPERASI PASAR TERBUKA BANK INDONESIA
DALAM MENGENDALIKAN LAJU INFLASI DI INDONESIA~~

Dipersiapkan dan disusun oleh
YOVI NOVERIZA
NIM. 01003120029

Telah dipertahankan di Depan Panitia Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 08 Februari 2005
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 08 Februari 2005

Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Didik Susetyo, M.Si
NIP.131 673 869



Drs. Harunnurasyid, M.Com
NIP. 131 844 026

Drs. Zulkarnain Ishak, MA
NIP. 130 704 345

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Drs. Suhel, M.Si
NIP. 131 993 979

MOTTO :

- *“Besar di depan orang kecil. kecil di depan orang besar. nyatalah kau orang kecil: Besar di muka orang besar. kecil di muka orang kecil. sungguhlah kau orang besar”.*

(Kutipan D. Djumala)

- *“Teruslah berjuang dalam kehidupan ini dengan tidak lupa salalu tetap usaha dan doa”.*

(Yovi. N '05)

“Ku curahkan segala baktiku pada Ibu, Ayah, kakak dan abangku untuk tiap titik keringat dan peluhmu yang mengkrystal, namun bukan yang terakhir, melainkan awal”

KATA PENGANTAR

Merupakan kewajiban bagi penulis untuk memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT atas Rahmat dan KaruniaNya. Setelah melalui masa-masa persiapan yang banyak menelan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran, akhirnya selesailah skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia dalam Mengendalikan Laju Inflasi di Indonesia”. Niat penulis untuk memilih topik ini karena penulis sangat ingin mengetahui dan mengamati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Otoritas Moneter dalam hal ini adalah Bank Indonesia yang sangat mempengaruhi roda perekonomian nasional. Apalagi ketika terjadinya krisis ekonomi nasional yang memaksa banyak terjadinya transformasi yang sangat mendasar baik itu pemerintah maupun Bank Indonesia itu sendiri.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis banyak menerima bimbingan, pengarahan, saran dan bantuan dari banyak pihak. Hal ini tidak lain disebabkan karena adanya keterbatasan penulis dalam hal kemampuan dan pengetahuan. Karenanya dalam kesempatan ini, penulis berkenan untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, pencipta semesta yang maha memiliki segalanya.
2. Nabi Muhammad SAW yang merupakan teladan bagi umat manusia di dunia yang fana ini.
3. Ibu Dra. Badia Perizade, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Didik Susetyo, selaku ketua skripsi
Bapak Drs. Harunnurasyid. M.Com, selaku anggota
Bapak Drs. Zulkarnain Ishak, MA, selaku penguji tamu
Yang telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan selama proses penulisan skripsi ini.

5. Kepada Bapak Indra Kuspriadi, SE, di bank Indonesia Palembang yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data dan sekaligus memberikan pengarahannya dalam pengolahan data kuantitatif.
6. Kak Ariodillah, SE yang telah sedia dan sabar menjadi arena perdebatan dan konsultasi skripsi ini.
7. Kepada Aan, Manto dan Irvan yang telah membantu penulis secara langsung dalam memproses data dengan regresinya, dan membantu segalanya bagi penulis. Mungkin ungkapan terima kasih terlalu sederhana bagi kalian.
8. Kepada Teman-teman kosku (Budiarto, Bram, Arrie, Andi), Hendra, Eko yang telah memberikan keceriaan maupun menghadapi candrdimuka dalam mengarungi kehidupan sehari-hari. Yakinkanlah, persahabatan sejati tidak akan pernah mati dan hanya hati yang selalu mendekatkan kita walaupun nantinya kita akan berjuang sendiri-sendiri.
9. Rekan-rekan Bright Production (Sigit, Fia n Iqbal) mari tuntaskan pekerjaan kita. Otre.
10. Sahabatku dan kawan-kawan secita-sita, sealmamater terutama pengurus BEM FE 2003-2004 yang selalu memberikan dorongan semangat dan sugesti yang sangat bermanfaat bagi penulis. Yuk Ros (Keuangan), Yuk Aslawati (kemahasiswaan) yang telah sabar “meladeni” penulis semasa di BEM.

Kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam masa penulisan skripsi ini, baik langsung maupun tidak, kiranya tidak ada kata lain yang layak diucapkan selain ucapan terima kasih setulus-tulusnya. Mudah-mudahan ungkapan rasa terima kasih ini akan tetap terpatir di hati selama degap jantung memacu darah. Dan Dialah Yang Maha Tahu lagi Maha Bijaksana untuk memberikan imbalan akan kebaikan yang diberikan.

Ucapan terima kasih khusus dan penuh hormat kepada seluruh keuarga. Ibu, dengan tetesan air mata dan kesabaran yang tulus untuk ananda. Ayah, dengan pengorbanan keringat yang terasa sangat sakit di tubuh yang telah memberikan dorongan moral dan material untuk ananda. Kakak dan abang yang selalu menjadi persinggahan terakhir adinda dalam mencurahkan keluh dan kesah. Atas semuanya sehingga terwujudnya skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran akan kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini, penulis berkenan menerima sumbangan pemikiran dari semua pihak untuk menuju pada kesempurnaan skripsi ini. Sekalipun dengan segenap perangkat kekurangannya, mudah-mudahan karya ini dapat memberikan “setitik pemikiran” pada luasnya “samudra ilmu pengetahuan”.

Palembang, Februari 2005

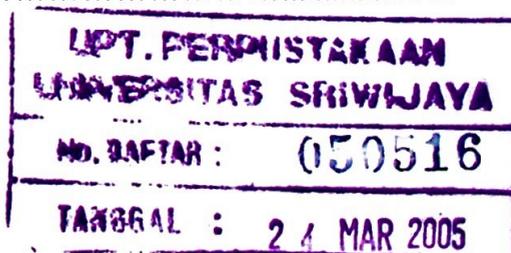
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vii
Daftar Lampiran	ix
Abstrak	x

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang	1
I.2. Perumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	9
I.4. Manfaat Penelitian.....	9
I.5. Studi Pustaka.....	10
I.5.1. Landasan Teori	10
I.5.2. Penelitian Terdahulu	25
I.6. Hipotesis	26
I.7. Metodologi Penelitian	26
I.7.1. Ruang Lingkup Penelitian	26
I.7.2. Metode Pengumpulan data.	26
I.7.3. Teknik Analisis	27
I.7.4. Batasan Variabel	28



BAB II. PAKET DEREGULASI KEUANGAN DAN PERKEMBANGAN INFLASI	
II.1. Paket Deregulasi Keuangan di Indonesia.....	30
II.2. Perkembangan Inflasi di Indonesia.....	36
II.3. Perkembangan Jumlah Uang Beredar M1.....	45
II.4. Perkembangan Tingkat Suku Bunga SBI.....	51
II.5. Perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.....	54
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
III.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inflasi.....	52
III.2. Analisis Kualitatif Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia dalam Mengendalikan Inflasi.....	59
III.3. Analisis Hasil Perhitungan Regresi Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia terhadap Laju Inflasi Periode 1988-2003.....	66
III.4. Analisis Perhitungan Regresi Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia terhadap Laju Inflasi periode 1988-1997.....	66
III.5. Analisis Perhitungan Regresi Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia terhadap Laju Inflasi periode 1998-2003.....	70
III.6. Analisis Perhitungan Regresi Pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia terhadap Laju Inflasi periode 1998-2003.....	71
III.7. Prospek Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia dalam Mengendalikan Laju Inflasi.....	73

BAB IV. KESIMPULAN

IV.1. Kesimpulan	75
IV.2. Saran	76

Daftar pustaka

Lampiran

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel I.1. Skema Pengendalian Moneter	20
Tabel II.1. Perkembangan M1 dalam Arti Sempit Periode 1988-2003 (Miliar Rupiah).....	47
Tabel II.2. Perkembangan Suku Bunga SBI Periode 1988-2003	52
Tabel II.3. Perakmbagn Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1988-2003	55
Tabel III.1. Tabulasi Silang antara Suku Bunga SBI dan Inflasi Periode 1988-2003	63

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar I.1. Perkembangan data Ekonomi makro Indonesia.....	4
Gambar I.2. Kurva Inflasi pandangan Moneterist.....	11
Gambar I.3. Kurva Kebijakan Fiskal	13
Gambar I.4. Kurva Supply Shock	15
Gambar I.5. Kurva Inflationary Gap	16
Gambar I.6. Kurva Demand Pull Inflation	17
Gambar I.7. Kurva Cost Push Inflation	18
Gambar I.8. Skema Alur Kebijakan Moneter	24
Gambar II.1. Perkembangan Inflasi Indonesia Periode 1988-2003	37
Gambar II.2. Perkembangan M1 Nominal dalam Arti Sempit Periode 1983-2004	49
Gambar II.3. Pertumbuhan M1 Nominal dalam Arti Sempit Periode 1990-2004	50
Gambar II.4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia periode 1988-2003	56
Gambar III.1. Tingkat Suku Bunga SBI dan Laju Inflasi Periode 1988-2003	64
Gambar III.2. Kurva Normal Untuk Suku Bunga SBI Periode 1988-2003	68
Gambar III.3. Kurva Normal untuk Suku Bunga SBI Periode 1988-1997	69
Gambar III.4. Kurva Normal untuk Suku Bunga SBI Periode 1998-2003	71
Gambar III.5. Kurva Normal untuk Suku Bunga SBI Periode 1988-1996	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah per Dolar AS Periode 1990-2003	82
Perkembangan Inflasi Periode 1990-2004	83
Lampiran 2	
Hasil Perhitungan Regresi	84

ABSTRAK

Persoalan utama yang dikaji adalah pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia dalam mengendalikan Laju Inflasi di Indonesia. Operasi Pasar Terbuka Bank Indonesia diukur dengan instrumen tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia. Pembahasan dilakukan dengan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan melihat hubungan dan pengaruh tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap inflasi. Selama periode pengamatan, laju inflasi hanya empat tahun berada di atas dua digit yaitu 1997, 1998, 2001 dan 2002, selebihnya inflasi hanya berada di bawah satu digit. Temuan menunjukkan :Pertama, terdapat pengaruh yang negatif antara tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap inflasi sebelum periode krisis moneter. Kedua, terdapat pengaruh yang positif antara tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia terhadap inflasi.

Kata kunci : Inflasi, tingkat bunga

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Inflasi merupakan persoalan ekonomi yang sangat ditakuti di setiap negara. Menurut Milton Friedman, inflasi merupakan fenomena moneter dengan adanya kenaikan harga secara terus-menerus. Hampir semua negara baik negara maju maupun negara berkembang memiliki masalah memelihara kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi (Faried, 1991 : 1). Masalah pemeliharaan kestabilan lebih bersifat jangka pendek, sedangkan masalah pertumbuhan ekonomi merupakan rencana jangka panjang.

Menurut teori kuantitas yang dikemukakan oleh Irving Fisher yaitu $MV = PT$ atau $P = MV / T$. Dari rumus tersebut berarti terdapat tiga faktor yang dapat menyebabkan P meningkat yaitu M, V, T. Inflasi terjadi karena meningkatnya jumlah uang beredar (M), kecepatan peredaran uang (V) yang tidak diimbangi oleh kecepatan penambahan jumlah barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat (T) (Roswita, 2000 : 165). Dalam keadaan inflasi, harga barang naik sedangkan deflasi harga barang-barang turun namun baik inflasi maupun deflasi tidak semua harga barang berubah dengan ragam dan arah yang sama. Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang tidak dapat kita kategorikan sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan harga

tersebut meluas pada sebagian besar dari harga barang-barang lain (Roswita, 2000:166).

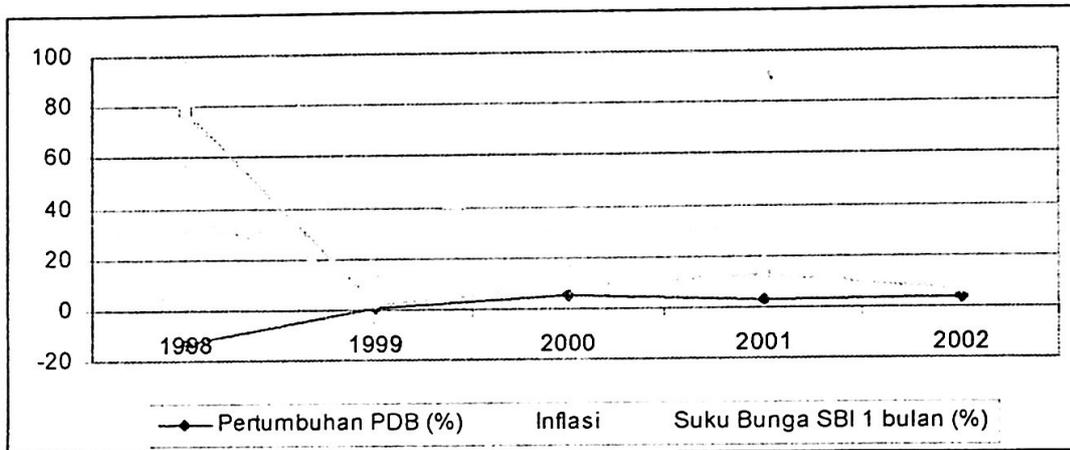
Sejarah awal masa Pemerintahan Orde Baru, diprioritaskan kepada persoalan yang sulit untuk menormalisasi keadaan ekonomi dan moneter yang telah berantakan pada tahun – tahun sebelumnya. Sederetan Kebijakan yang diambil antara lain (Ismail, 1991 : 26): *pertama*, tindakan moneter 1965 yang menetapkan mata uang rupiah baru menggantikan seribu rupiah uang lama. *Kedua*, mengusahakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang seimbang, walaupun dengan bantuan kredit lunak dari negara donor IGGI sehingga sumber inflasi dari defisit anggaran bisa segera ditiadakan. *Ketiga*, menormalisasi kembali struktur perbankan. *Keempat*, Menggalakkan tabungan (deposito) yang sekaligus ditujukan untuk mengurangi inflasi dengan menetapkan tingkat bunga deposito yang menarik. *Kelima*, penyehatan posisi Neraca Pembayaran dengan mengusahakan *moratorium* pembayaran utang luar negeri dan sekaligus mendapat bantuan baru termasuk pangan demi perbaikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. *Keenam*, normalisasi hubungan dengan luar negeri termasuk melakukan pembicaraan kompensasi segala perusahaan dan perkebunan untuk menjadi Usaha Milik Negara. *Ketujuh*, mengeluarkan Undang – Undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal dalam Negeri sekaligus memberi kemudahan dalam hal perizinan.

Secara normatif langkah-langkah pemerintahan Orde Baru di bidang ekonomi sangat baik, tidak demikian adanya dalam tahap pelaksanaan. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama rezim Orde Baru memang telah menghasilkan suatu proses

perubahan ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi dengan biaya ekonomi yang tinggi serta fundamental ekonomi yang rapuh (Tambunan, 2003 : 15). Hal ini dapat dilihat dari buruknya kondisi sektor perbankan dan semakin besarnya ketergantungan Indonesia terhadap modal asing termasuk pinjaman dan impor.

Inilah yang membuat Indonesia terjerumus dalam krisis ekonomi yang diawali dengan tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, setelah terjadi hal yang serupa terhadap Bath Thailand tanggal 2 Juli 1997 dan Peso Filipina tanggal 11 Juli 1997 (Djiwandono, 2001 : 7). Kejadian tersebut berimbas pada krisis moneter yang telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Bangsa Indonesia. Era reformasi, setidaknya telah memberikan sebuah harapan masa depan yang lebih baik yang ditandai dengan suksesnya Pemilihan Umum 1999 yang telah melahirkan pemimpin baru kendatipun arahnya masih sulit untuk di prediksi saat ini. Dewasa ini masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak populer dan memberatkan rakyat, sehingga sering mendapat reaksi yang keras dari masyarakat. Hal ini membuat pemerintah lebih berhati-hati dalam menerapkan sebuah kebijakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat banyak.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat terlihat dari kondisi makro ekonomi Indonesia yang diwarisi oleh pemerintahan Abdurrahman Wahid dan awal pemerintahan Megawati, setidaknya sampai dengan tahun 2002. Kondisi ini dapat kita lihat dalam trend di bawah ini :



Gambar I.1.
Perkembangan Data Ekonomi Makro Indonesia 1998 – 2002

Sumber : Tambunan, *Perekonomian Indonesia beberapa masalah penting*, Ghalia Indonesia 2003, Jakarta

Kalau diperhatikan trend di atas, keterpurukan kondisi ekonomi kian terasa seperti tingkat suku bunga, inflasi, saldo neraca pembayaran dan defisit APBN. Suku bunga untuk Sertifikat bank Indonesia (SBI), misalnya, pada tahun 2001 mencapai angka di atas 17 % padahal sebelumnya tahun 1999 hanya sekitar 13 %. Indikator lainnya seperti inflasi juga terasa berat. Pada tahun 1999 inflasi hanya berkisar 2 %, sedangkan pada tahun 2001 naik hingga 7,7 %. Bahkan laju inflasi selama periode Juli 2000-Juli 2001 sudah mencapai 13,5 %. Angka ini sangat mengkhawatirkan karena dalam asumsi APBN 2001, pemerintah menargetkan inflasi dalam tahun 2001 hanya 9,4 %. Pada tahun 2002 kondisi perekonomian Indonesia sedikit lebih baik dari pada tahun 2001, walaupun menjelang akhir 2002 Indonesia terkena serangan bom Bali. Rendahnya pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2001 disebabkan antara lain

karena kurangnya investasi swasta baik dari dalam maupun luar negeri (Wijaya, 2000 : 12)

Di bidang ekonomi, tanpa mengabaikan pentingnya pembahasan tentang otonomi daerah, perubahan yang cukup signifikan terjadi dibidang ekonomi adalah perubahan status Bank Indonesia sebagai bank sentral yang dahulu dari sebagai *sub-ordinatif* otoritas moneter melalui Dewan Moneter berdasarkan undang-undang No. 13/68 menjadi pemegang otoritas moneter tertinggi berdasarkan Undang-Undang No. 23/1999 (Wijaya, 2000: 47).

Berkaitan dengan Bank Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang 23/1999, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar baik secara tugas, fungsi dan peranannya dalam menentukan arah perkembangan perekonomian negara apalagi baru-baru ini Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang Arsitektur Perbankan Indoneisa (API) yang memiliki visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Suherman, 2004 : 1). Dalam pencapaian visi tersebut didukung pula enam pilar API yakni menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat, menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing yang tinggi, menciptakan *good corporate governance*, mewujudkan infrastruktur yang lengkap dan mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen (Amidi, 2004 : 6). Pengawasan dan sistem pengaturan bank secara komprehensif merupakan taruhan Bank Indonesia sendiri.

Krisis ekonomi diawali dari krisis moneter dengan tertekannya nilai tukar Rupiah setelah Baht dan Peso yang kemudian berimbas pada krisis perbankan di mana perbankan tanah air ditinggalkan oleh para deposan (baca: *rush*) dan ditolakny, *Letter of credit (L/C)* oleh bank-bank luar negeri. Ketika itu terjadi, para akademisi, pengamat dan praktisi ekonomi, langsung menjustifikasi bahwa Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter telah gagal menjalankan tugasnya. Namun pihak Bank Indonesia menolak anggapan tersebut dengan alasan bahwa kewenangan melaksanakan kebijakan moneter yang diembannya tidak *pure* (murni), karena banyaknya kepentingan yang ikut “bermain” dalam segala kebijakan Bank Indonesia, di samping itu banyaknya tugas (*multiple objective*) yang harus diemban oleh Bank Indonesia seperti memajukan perekonomian, menekan laju inflasi, memperluas kesempatan kerja, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan pemerataan pendapatan, membuat kebijakan Bank Indonesia menjadi tidak fokus dan tidak maksimal hal ini diperparah lagi dengan kondisi bahwa terkadang tujuan itu mengandung unsur *trade off* (Sitorus, 1998 : 97)

Akan tetapi Bank Indonesia tetap melakukan langkah-langkah untuk meredam kemerosotan nilai tukar rupiah, sebagai berikut (Masyhud , 2002 : 47) :

Pertama : *Tight money policy* dengan menutup “keran” kredit perbankan, menekan jumlah peredaran rupiah melalui penarikan dan pensiun dan asuransi dari rekening bank-bank pemerintah dan swasta.

Kedua : Menaikkan tingkat suku bunga SBI yang kemudian menjadi pemicu dari naiknya tingkat suku bunga perbankan secara menyeluruh yaitu naiknya tingkat suku bunga kredit dan deposito sekaligus.

Ketiga : Memaksakan dilaksanakannya *prudential banking practices* meskipun di tengah situasi ekonomi, sosial dan politik yang bergejolak. Hal ini justru mendorong pemerintah dalam posisi yang dilematis. Dengan memaksakan ketentuan-ketentuan perbankan yang normal (menyangkut besaran CAR minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap jajaran perbankan, keharusan pembentukan cadangan penghapusan yang cukup sesuai dengan kolektibilitas pinjaman yang justru sedang parah-parahnya karena serbuan krisis nilai tukar rupiah yang anjlok). Pemerintah sebenarnya telah mengambil langkah yang merugikan bagi pemerintah sendiri karena pada saat yang sama pemerintah juga telah melakukan program penjamin, sedangkan porsi kredit macet yang diperkirakan telah mencapai 60%-70% dari aktivaperbankan nasional oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, era reformasi merupakan moment yang tepat untuk kembali memposisikan Bank Indonesia sebagai lembaga pemegang otoritas moneter dan lepas dari segala intervensi pihak luar. Ada dua hal penting dan krusial yang diamanatkan oleh undang-undang 23/1999 (Roswita AB , 2000 : 243). Pertama, Bank Indonesia lepas dari segala intervensi pihak luar oleh sebab itu kedudukan Bank Indonesia independen terhadap lembaga lain khususnya terhadap pemerintah. Independensi Bank Indonesia tersebut dalam hal, menetapkan target-target yang akan dicapai (*goal*

independece) dan kebebasan dalam menggunakan piranti (instrumen) kebijakan dalam mencapai target tersebut (*instrument independence*), disamping itu Dewan Gubernur Bank Indonesia tidak bertanggung jawab kepada Presiden dan tidak dapat dihentikan oleh Presiden, kecuali mengundurkan diri, berhalangan tetap atau terbukti melakukan pelanggaran tindak pidana (pasal 48, UU No. 23/1999). Kedua, tugas pokok Bank Indonesia dari beragam sasaran (*multiple objective*) berdasarkan undang-undang yang lama menjadi sasaran tunggal (*single objective*) pada undang-undang yang baru sebagaimana yang tercantum secara eksplisit dalam pasal 7, UU No. 23/1999 yaitu “*tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah*”. Dengan *single objective* maka tingkat keberhasilan Bank Indonesia dalam menjalankan misinya akan lebih mudah diukur dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Walaupun tugas pokok Bank Indonesia menjadi terfokus dan hanya *single objective*, namun dalam pelaksanaannya cukup berat mengingat kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari tingkat inflasi (*internal value*) dan nilai tukar (*eksternal value*) tidak sepenuhnya berada dalam kendali Bank Indonesia. Apabila dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, faktor tersebut dapat dibagi dua yaitu tekanan dari sisi permintaan dan tekanan dari sisi penawaran (Lucket, 1991 : 157) Dalam hal ini, Bank Indonesia hanya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan, sedangkan tekanan dari sisi penawaran sepenuhnya berada di luar kendali Bank Indonesia. Oleh sebab itu diperlukan sinkronisasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat dan

memberikan kontribusi terhadap terciptanya inflasi yaitu Bank Sentral, Pemerintah dan Swasta untuk bersama-sama saling mendukung. Tanpa dukungan dari semua pihak tersebut, inflasi sangat sulit untuk dikendalikan.

I.2. Perumusan Permasalahan

Dari uraian-uraian terdahulu, kita telah dapat mengetahui gambaran global tentang terjadinya krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia dan juga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan Bank Indonesia dalam menangani krisis tersebut. Bank Indonesia telah melakukan kebijakan moneter baik itu yang bersifat ekspansif maupun yang bersifat kontraktif dalam mengatasi persoalan ekonomi Indonesia salah satunya inflasi.

Berdasarkan uraian terdahulu sifatnya terlalu umum dan global, dalam bagian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana pengaruh kebijakan Operasi Pasar Terbuka yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia ?

I.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk melihat sejauhmana pengaruh kebijakan Operasi Pasar Terbuka bank Indonesia dalam mengendalikan laju inflasi di Indonesia.

I.4. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan khususnya di bidang moneter dan keuangan untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menyelesaikan berbagai masalah.
2. Sebagai acuan dan referensi bagi penulis lain yang akan mengkaji permasalahan tentang ilmu moneter.

I.5. Studi Pustaka

I.5.1. Landasan Teori

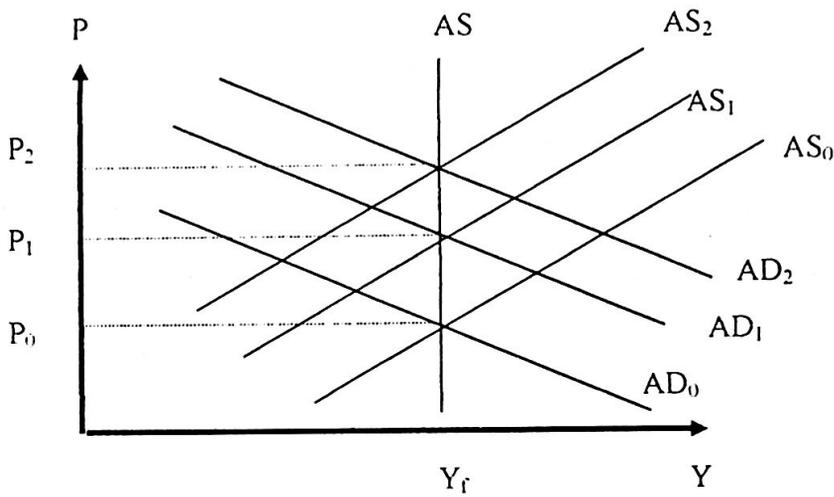
Dalam literatur makro ekonomi kegiatan ekonomi tercermin pada pendapatan nasional (GNP/GDB), tingkat pengangguran, tingkat inflasi dan neraca pembayaran. Majunya perekonomian sebuah negara dapat dilihat dari indikator pendapatan nasional yang tinggi, tingkat pengangguran yang rendah, laju inflasi yang terkendali dan surplus neraca pembayaran (Case & Fair, 2002: 48). Untuk mencapai tujuan itu, para pengambil kebijakan ekonomi negara (Bank Sentral dan Pemerintah) memiliki dua bentuk kebijakan utama yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan wewenang dari Bank Sentral, sementara kebijakan fiskal merupakan kewenangan yang ada pada Pemerintah.

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter disertai tugas untuk mengendalikan inflasi dengan menggunakan instrumen kebijakan moneter yang ada untuk mempengaruhi tingkat bunga, kredit dan jumlah uang beredar.

Kaum Moneterist yang dipelopori oleh Milton Friedman, berpendapat bahwa inflasi merupakan fenomena moneter (Nopirin, 1987:90). Oleh sebab itu, inflasi

selalu timbul sebagai akibat bertambahnya jumlah uang beredar. Gambar 1 di bawah

ini menjelaskan pernyataan di atas.



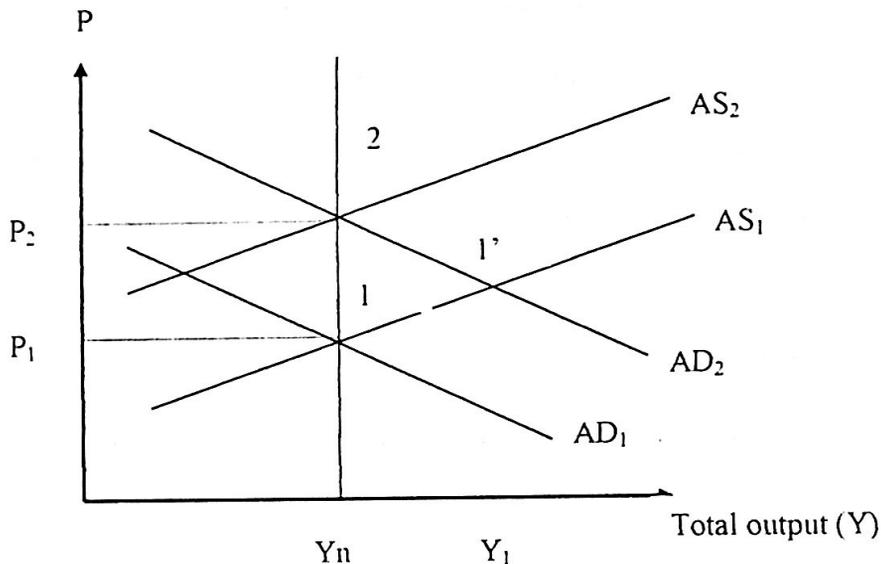
Gambar I.2

Kurva Inflasi Pandangan Moneterist (Nopirin, 1997 : 92)

Dengan kurva penawaran total (AS) vertikal pada tingkat pengeluaran penuh tenaga kerja (*output full employment*), kenaikan permintaan total (AD) akan mengakibatkan kenaikan harga. Mula-mula perekonomian berada titik 0 (perpotongan AD_0 dan AS_0) dan tingkat harga P_0 . Jika uang beredar terus bertambah maka pada pertambahan pertama hal ini akan menggeser kurva AD_0 ke AD_1 . Begitu pula jika uang beredar meningkat lagi pada tahun depan, maka AD akan bergeser lagi dari AD_2 ke AD_3 dan AS_2 ke AS_3 dan perekonomian akan berada pada titik 2 dengan tingkat harga P_3 . Begitu seterusnya jika uang beredar terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, maka hal ini akan berulang dan tingkat harga semakin tinggi dan juga akan terjadi inflasi karena kenaikan harga secara terus-menerus. Terjadi kenaikan

permintaan total secara terus menerus yang diikuti dengan kenaikan harga. Faktor utama yang mengakibatkan kenaikan permintaan total adalah kenaikan jumlah uang beredar sebagai akibat kebijaksanaan Bank Sentral yang ekspansif. Dengan demikian, kaum Moneterist berpendapat bahwa bila terjadi inflasi maka Bank Sentral-lah yang merupakan penyebabnya sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan oleh Bank Sentral dengan jalan pengetatan moneter atau kebijakan moneter yang restriktif (*tigh money policy*). Bila kita berpendapat sama dengan kaum Moneterist, berarti permasalahan inflasi didunia ini tidak menjadi momok perekonomian yang menakutkan sebab mengatasi inflasi cukup dengan mengendalikan jumlah uang beredar.

Tesis di atas ditentang oleh kaum Keynesian yang berpendapat bahwa kenaikan permintaan total bukan hanya disebabkan oleh kenaikan jumlah uang beredar tetapi juga berasal dari kenaikan pengeluaran investasi pengusaha, defisit anggaran belanja pemerintah dan kenaikan pengeluaran konsumsi masyarakat. Dalam hal terjadi inflasi, Keynesian cenderung menyalahkan Pemerintah karena menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif (defisit anggaran belanja) meskipun menurut kaum Moneterist defisit anggaran belanja Pemerintah dapat menimbulkan inflasi bila pembiayaannya dilakukan dengan menambah jumlah uang beredar.



Gambar I.3
Kurva Kebijakan Fiskal (Mishkin, 1996 : 56)

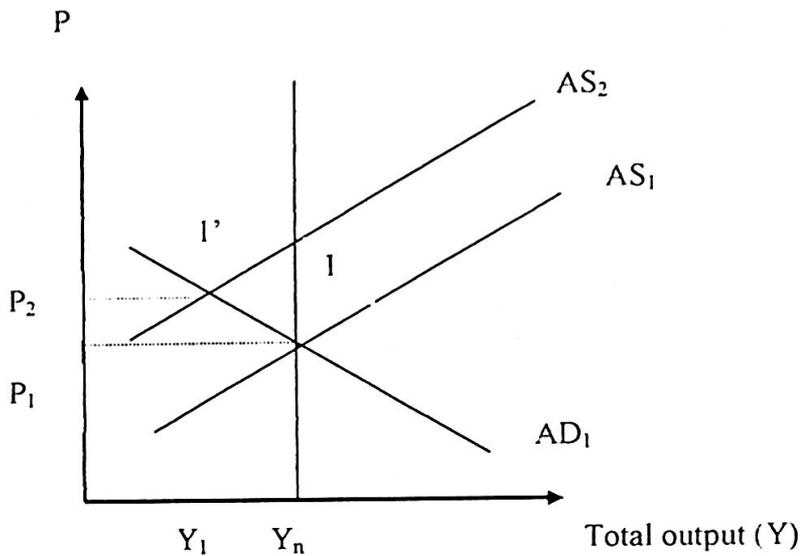
Pada mulanya perekonomian berada pada titik 1 dengan tingkat harga P_1 dan total output Y_n . Kemudian pemerintah menaikkan pengeluarannya misalnya dari Rp 500 menjadi Rp 600 yang berakibat bergesernya kurva AD_1 menjadi AD_2 . Hal ini mengakibatkan berpindahnya keseimbangan dari titik 1 ke titik i' dan total output berpindah dari Y_n ke Y_1 . Kurva AS akan mulai bergeser dari AS_1 ke AS_2 karena $Y_n < Y_1$ dan titik keseimbangan total output dari Y_1 kembali ke titik keseimbangan Y_n tetapi dengan tingkat harga yang lebih tinggi yaitu P_2 .

Disini terlihat bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah hanya mengakibatkan kenaikan harga sekali saja dan tidak terus berlanjut. Jika kemudian pemerintah kembali menambah pengeluarannya tetapi hal ini tidak bisa mengakibatkan inflasi

karena adanya keterbatasan pemerintah dalam hal pengeluarannya (Mishkin,1996: 354). Pemerintah tidak bisa terus menerus menambah pengeluarannya karena adanya batasan GNP. pengeluaran pemerintah tidak bisa melebihi total GNP. Bahkan pada kenyataannya pemerintah akan berhenti menambah pengeluarannya sebelum mencapai total GNP yang dimiliki. Jadi disini dapat ditarik kesimpulan bahwa “Pengeluaran pemerintah tidak bisa mengakibatkan inflasi.” Selain dari menambah pengeluarannya, pemerintah juga dapat menurunkan pajak. Namun hal inipun tidak dapat mengakibatkan inflasi. Pajak tidak dapat mengakibatkan inflasi karena penurunan pajak juga ada batasnya yaitu pajak tidak dapat dikurangi terus sampai mencapai titik 0 (tidak ada pajak sama sekali).

Jika jumlah uang beredar tetap maka kurva AD tidak akan bergeser maka kita akan berada pada titik I dengan total output Y_1 dan tingkat harga P_1 , di karenakan $Y_1 < Y_n$ maka kurva AS akan kembali bergeser dari AS_2 ke AS_1 dan perekonomian kembali ke titik semula yaitu pada titik I dengan output Y_n .

Dari kedua pendapat yang menggunakan analisa AD-AS di atas menunjukkan bahwa baik Keynesian maupun Moneterist sependapat dengan Milton Friedman bahwa inflasi selalu merupakan fenomena moneter (Mishkin,1996 : 356). Dengan pengertian inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus.



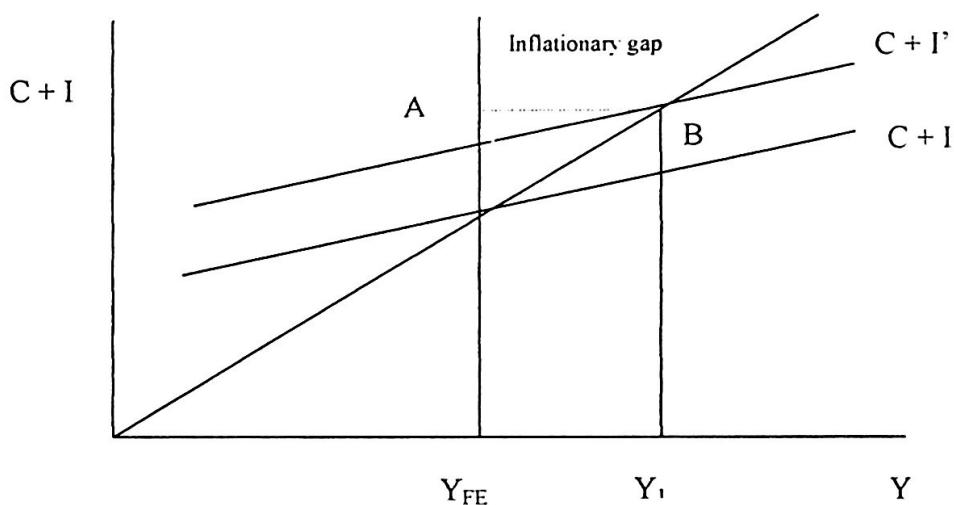
Gambar I.4
Kurva Supply Shock (Mishkin, 1996 : 174)

Menurut teori Kuantitas sebab utama timbulnya inflasi adalah kelebihan permintaan yang disebabkan karena penambahan jumlah uang beredar. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi antara lain (Nopirin, 1997 : 28-30):

1. Demand pull Inflation

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (agregat demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total di samping menaikkan harga juga dapat menaikkan hasil produksi (*output*). Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah akan menaikkan harga saja (sering disebut dengan inflasi murni). Apabila kenaikan permintaan ini menyebabkan keseimbangan GNP

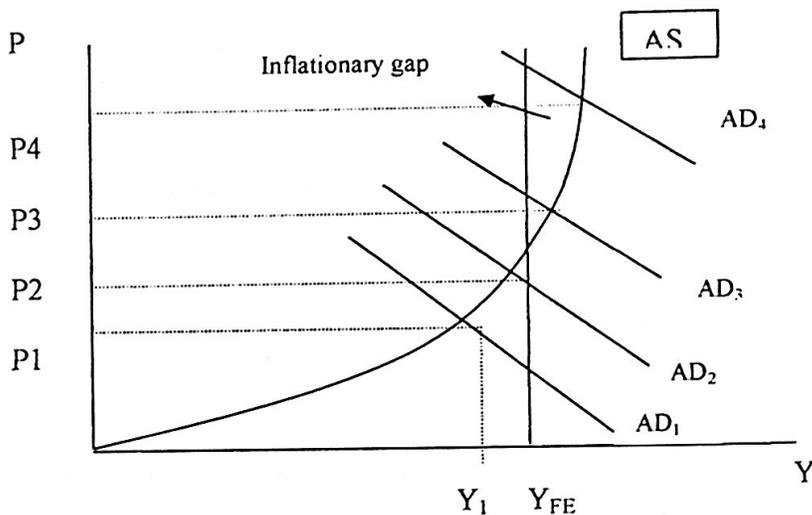
berada di atas atau melebihi GNP pada kesempatan kerja penuh maka akan terdapat adanya “inflationary gap”. Inflationary gap inilah yang dapat menimbulkan inflasi. Secara grafis dapat di gambar sebagai berikut :



Gambar I.5
Inflationary Gap (Nopirin, 1997 : 28)

Kenaikan pengeluaran total dari $C + I$ menjadi $C + I'$ akan menyebabkan keseimbangan pada titik B berada di atas GNP kesempatan kerja penuh (Y_{FE}). Jarak $A - B$ atau $Y_{FE} - Y_1$ menunjukkan besarnya *inflationary gap*.

Dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran total proses terjadinya *demand pull inflation* dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar I.6
Demand pull Inflation (Nopirin, 1997 : 29)

Bermula dengan harga P_1 dan output Y_1 , kenaikan permintaan total dari AD_1 ke AD_2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Akibatnya, harga naik menjadi P_2 dan output naik menjadi Y_{FE} . Kenaikan AD_2 selanjutnya menjadi AD_3 menyebabkan harga naik menjadi P_3 sedang output tetap pada Y_{FE} . Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya *inflationary gap*. Proses kenaikan harga ini akan terus berjalan sepanjang permintaan total terus naik.

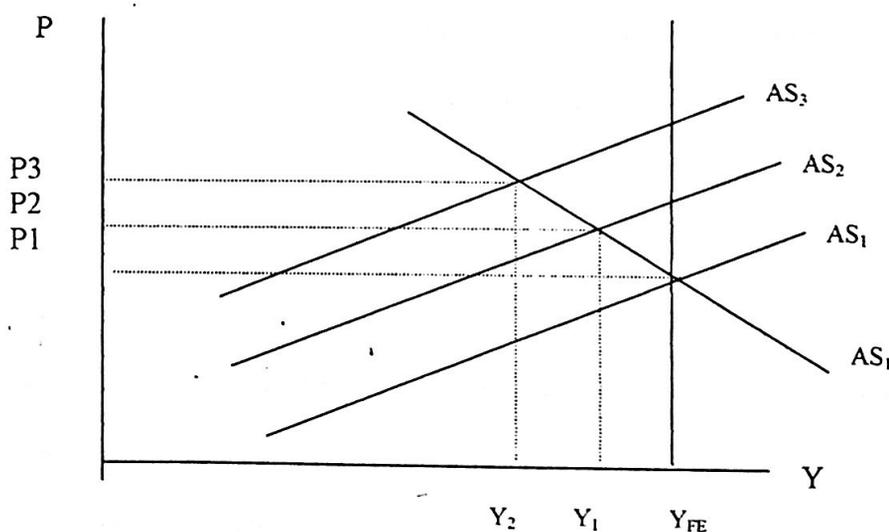
2. Cost-push inflation

Berebeda dengan *demand pull inflation*, *cost-push inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi atau biasa dikenal dengan inflasi yang di barengi dengan resesi. Keadaan ini timbul di mulai dengan adanya penurunan

dalam penawaran total sebagai akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi ini dapat timbul karena beberapa faktor, di antaranya :

- Perjuangan serikat buruh yang berhasil untuk menuntut kenaikan upah
- Suatu industri yang sifatnya *monopolistis*, pimpinan dapat menggunakan kekuasaannya di pasar untuk menentukan harga yang lebih tinggi.
- Kenaikan harga bahan baku industri

Kenaikan biaya produksi pada gilirannya akan menaikkan harga dan turunkannya produksi. Kalau proses ini berjalan terus, maka timbullah *cost-push inflation*. Gambar di bawah ini menjelaskan terjadinya *cost-push inflation*.



Gambar I.7
Cost-push inflation (Nopirin, 1997 : 29)

Bermula pada harga P_1 dan Y_{FE} . Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat pekerja ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS_1 menjadi AS_2 . Akibatnya harga naik menjadi P_2 dan produksi turun menjadi Y_1 . Kenaikan harga selanjutnya akan menggeser kurva AS menjadi AS_3 , harga naik dan produksi turun menjadi Y_2 .

Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan harga ini (yang sering juga dibarengi dengan turunnya produksi) disebut dengan *cost-push inflation*.

Dalam implementasi kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukannya dalam dua cara yaitu cara langsung dengan menggunakan otoritas yang dimiliki atau dengan cara tidak langsung dengan menggunakan kemampuan mempengaruhi pasar yang dimiliki berkaitan dengan kedudukan Bank Indonesia sebagai *issuer* dari uang primer (Mo) (Sitorus, 1998 : 99). Mengenai pengendalian moneter langsung, Bank Indonesia menetapkan suatu limit terhadap kenaikan harga uang (suku bunga) atau kuantitas uang (kredit bank), sedangkan pengendalian moneter tak langsung, Bank Indonesia mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran melalui pasar uang. Kerangka pengendalian moneter tak langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Otoritas moneter melakukan pendekatan sasaran antara yang juga berperan sebagai indikator. Dalam pelaksanaan pengendalian moneter tidak langsung, otoritas moneter selalu di hadapkan pada dua pilihan sasaran antara , apakah suku bunga atau agregat moneter (Sitorus, 1998 :1001). Pilihan tersebut dapat berubah-ubah sesuai

dengan perubahan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Pada tingkat operasional, biasanya otoritas moneter dapat menggunakan suku bunga jangka pendek ataupun uang primer (Mo) sebagai sasaran operasional yang dapat dipengaruhi secara langsung oleh Bank Indonesia melalui instrumen moneter. Dengan asumsi *money multiplier* yang stabil, perubahan pada uang primer ini di harapkan dapat menyentuh sasaran antara.

Tabel I.1
Skema Pengendalian Moneter

Instrumen	Sasaran Operasional	sasaran Antara	Sasaran Akhir
Operasi Pasar Terbuka (lelang SBI)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang primer ▪ Net Domestic Asset ▪ liquidity Support ▪ Net International reserve 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uang beredar (M1 dan M2) ▪ Kredit perbankan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inflasi ▪ Pertumbuhan ekonomi ▪ Neraca pembayaran

Sumber: Sitorus Tarmiden, Buletin Ekonomi Perbankan, Bank Indonesia 1998, Jakarta

Bila Bank Indonesia membeli obligasi dari masyarakat, Bank Indonesia membayarnya dengan mengeluarkan cek yang ditarik dari Bank Indonesia dan dibayarkan kepada penjual. Bank umum menyerahkan cek ini kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pembayaran dan Bank Indonesia membukukannya serta menambah deposit Bank umum tadi pada Bank Indonesia. Ketika Bank Indonesia menjual surat berharga kepada masyarakat, maka ia menerima cek dari pembeli yang ditarik dari simpanannya sendiri. Bank Indonesia menyerahkan cek ini ke bank umum untuk mendapatkan pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan membukukannya sehingga mengurangi simpanan bank umum ini pada Bank Indonesia. Bank Indonesia mengurangi asetnya dalam bentuk surat berharga dan

mengurangi kewajibannya dalam bentuk simpanan di bank umum. Masyarakat menambah simpanan surat berharganya dan mengurangi simpanan tunainya di bank. Sementara itu, bank umum mengurangi kewajiban depositonya kepada masyarakat dan mengurangi cadangannya di Bank Indonesia. Dengan demikian akan mengurangi jumlah uang beredar. Dampak lebih jauh lagi akibat adanya operasi pasar terbuka dapat dilihat dalam skema berikut :

Bank Indonesia menjual SBI → Bank umum beli SBI → cadangan bank umum (turun) → kemampuan kredit (turun) → tingkat bunga (naik) → investasi (turun) → pendapatan (turun) Konsumsi (turun) → Agregat demand (turun) → inflasi (turun)

Sumber : Laporan Bank Indonesia ,1999, hal : 124

Bank Indonesia beli SBI → Bank umum jual SBI → Cadangan bank umum (naik) → Kemampuan kredit (turun) → Tingkat bunga (turun) → Investasi (naik) → Pendapatan (naik) → Konsumsi (naik) → Agregat demand (naik) → Inflasi (naik)

Sumber : Laporan Bank Indonesia,1999, hal : 127

Skema, di atas telah menjelaskan bagaimana kebijakan operasi pasar terbuka dengan membeli atau menjual SBI tersebut dapat mempengaruhi keadaan perekonomian suatu negara.

Secara umum kebijakan operasi pasar terbuka ini mempunyai beberapa kelebihan dan kelemahan. Hal ini dapat di lihat sebagai berikut (Mishkin, 1996 : 245):

Kelebihan :

1. Dengan menggunakan Operasi Pasar Terbuka, Bank Indonesia dapat secara penuh mengontrol volume jumlah uang beredar.
2. Operasi Pasar Terbuka mudah disesuaikan dan efektif penggunaannya dengan berbagai tingkatan. Maksudnya jika Bank Indonesia ingin mengubah cadangan bank dan *base money* baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak, Operasi Pasar Terbuka bisa dilakukan melalui pembelian dan penjualan dari obligasi.
3. Operasi Pasar Terbuka sangat mudah untuk di koreksi. Bila terjadi kondisi uang buruk akibat kebijakan ini, misalnya penambahan jumlah uang beredar yang terlalu cepat akibat terlalu besarnya pembelian obligasi, maka Bank Indonesia dapat dengan mudah mengoreksi kesalahan tersebut dengan jalan membeli obligasi tersebut.

Kelemahan :

Pemerintah harus membayar bunga atas penggunaan operasi pasar terbuka ini, dimana hal ini merupakan beban pada anggaran pemerintah yang juga menambah jumlah uang beredar.

Kelebihan dan kelemahan tersebut merupakan suatu fenomena yang harus diantisipasi oleh Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan moneter karena hal ini akan sangat berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi dan variabel-variabel moneter lainnya.

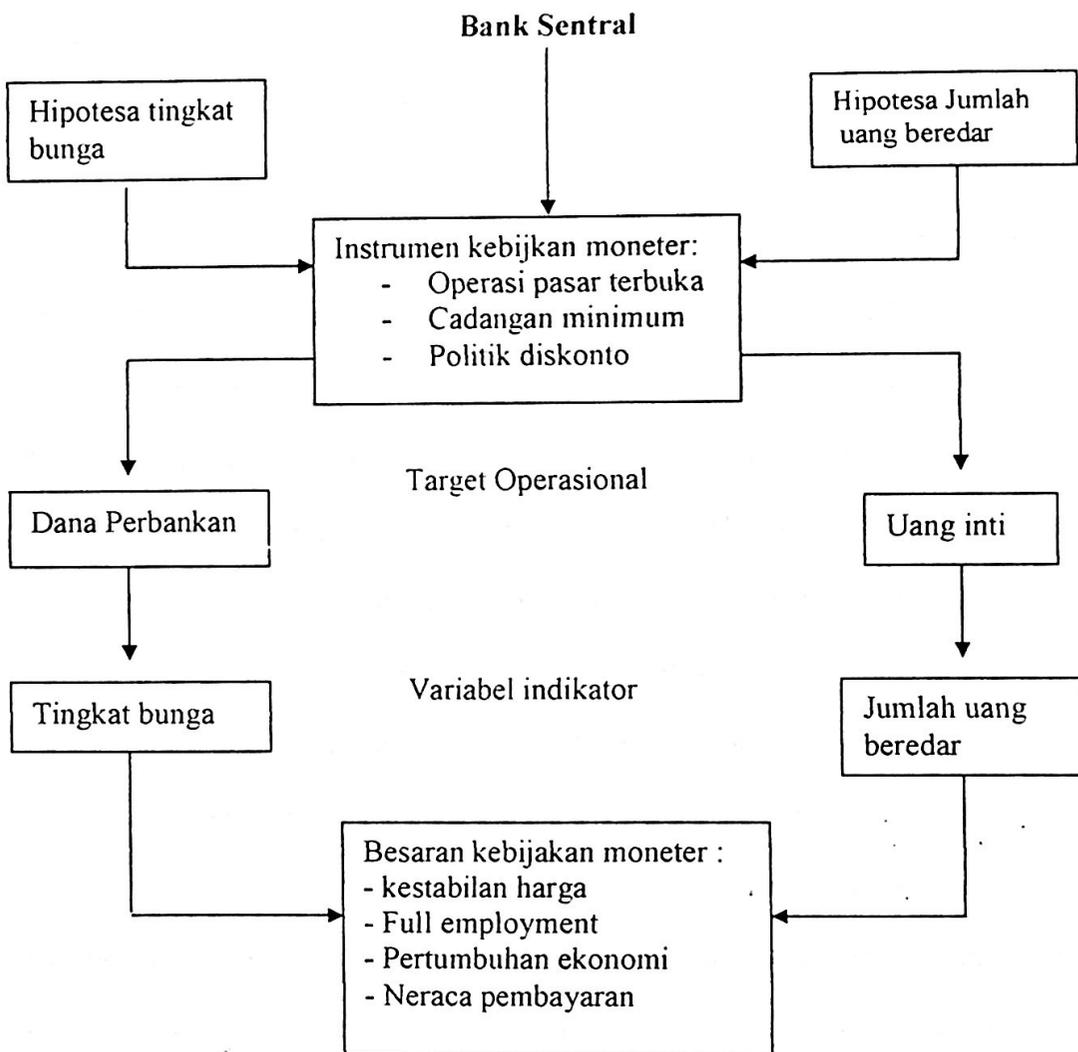
Pengendalian moneter secara tidak langsung hanya bisa efektif kalau ada suatu pasar uang yang bekerja secara efisien dan untuk ini diperlukan lembaga

perbankan, sebagai pelaku pasar uang yang kompetitif sehingga mekanisme transmisi dari instrumen moneter ke sasaran moneter yang ingin di capai dapat berfungsi secara optimal.

Dalam hal melihat indikator kebijakan moneter apakah bersifat ekspansif (mendorong laju inflasi) atau kontraktif/restriktif (menekan laju inflasi), kaum Moneterist beranggapan bahwa indikatornya dalam dilihat dari besarnya pertumbuhan jumlah uang beredar (Boediono, 1996 : 98). Anggapan ini didasarkan pada keyakinan kaum Moneterist bahwa ada hubungan langsung antara jumlah uang beredar dengan kegiatan ekonomi karena adanya kestabilan permintaan uang. Sedangkan Keynesian beranggapan bahwa indikator kebijakan moneter dilihat dari cadangan minimum bank, jumlah kredit dan tingkat suku bunga, dasar anggapan ini menurut Keynesian bahwa terdapat mekanisme tidak langsung antara kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi.

Dalam perekonomian suatu negara, mencapai tingkat pengangguran yang rendah dan laju inflasi yang terkendali merupakan dua hal yang bersifat "trade-off". Hal ini dapat dijelaskan dengan pendekatan kurva Phillips (*Phillips curve approach*). Kurva Phillips menunjukkan hubungan antara inflasi dan pengangguran yang negatif, artinya bila suatu negara ingin menekan tingkat pengangguran serendah mungkin maka negara tersebut harus rela menanggung beban inflasi yang tinggi (Nopirin, 1997: 68). Hal ini berarti antara kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Sentral dan kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Pemerintah mengandung dilema, mana yang harus menjadi prioritas? Pengangguran atau inflasi? Meskipun demikian kurva

Phillips tidak sepenuhnya dapat menjadi acuan bilamana terjadi suatu keadaan yang luar biasa disaat kondisi perekonomian berada pada saat *stagflasi*, seperti yang dialami oleh Indonesia pasca krisis ekonomi (Nopirin, 1987:39).



Gambar I.8
Skema alur pengaruh
Kebijakan Moneter

I.5.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Adiningasih (1991: 28), menemukan hubungan yang negatif antara inflasi dan pengangguran di Indonesia sebagaimana yang digambarkan oleh kurva Phillips sehingga menimbulkan dilematis bagi pemerintah, sedangkan Marie Pangestu (1992 : 92), menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat antara pertambahan jumlah uang beredar dengan tingkat inflasi di Indonesia, hal ini disebabkan kebijakan-kebijakan Pemerintah mendevaluasi mata uang Rupiah dan berbagai kebijakan Paket Ekonomi (Pakto). Laporan Triwulan I – 2003 bank Indonesia, menyebutkan penggunaan instrumen Operasi Pasar Terbuka (OPT) optimal dalam membantu meminimalkan fluktuasi nilai tukar rupiah, sedangkan laporan Triwulan II- 2003 menyatakan bahwa stabilnya nilai tukar rupiah anatara lain disebabkan oleh faktor suku bunga dalam negeri yang jauh lebih besar dari pada suku bunga di luar negeri yang merupakan bagian dari pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka (OPT).

Aulia (2001: 31), menemukan bahwa suku bunga merupakan instrument utama dalam kerangka kebijakan moneter yang mempengaruhi berbagai variabel seperti suku bunga jangka pnjang, harga aset, ekspektasi dan nilai tukar yang variabel tersebut kemudian berpengaruh terhadap perubahan domestic demand. Sitorus (1998:12), menyatakan bahwa Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama ini berperan bukan anya sebagai instrumen kontraksi moneter, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam pasar uang dalam negeri, SBI sampai dengan jumlah uang beredar tertentu masih perlu dipertahankan sehingga tersedia lebih banyak instrumen pasar uang anatar bank untuk penanaman kelebihan likuiditas bank-bank jangka pendek.

I.6. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan landasan teori yang dijelaskan pada bagian terdahulu, diambil suatu kesimpulan sebagai jawaban sementara permasalahan diatas adalah Pengaruh kebijakan Operasi Pasar terbuka Bank Indonesia melalui tingkat bunga SBI berpengaruh secara negatif terhadap tingkat inflasi..

I.7. Metodologi

I.7.1. Ruang Lingkup

Dalam tulisan ini, lingkup pembahasan yang digunakan adalah data Indonesia tentang kebijakan Operasi Pasar Terbuka tahun 1988 – 2003 karena pada tahun 1983 pemerintah mengeluarkan deregulasi 27 Oktober 1988. Dalam pembahasan ini, variabel yang digunakan adalah variabel-variabel makro ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi serta variabel-variabel moneter seperti tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), M1 nominal dan M1 riil.

I.7.2. Metode Pengumpulan data

Untuk mendukung menganalisis permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan data-data sekunder yang bersumber dari data publikasi Bank Indonesia, statistik ekonomi keuangan Indonesia dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan media cetak serta literatur-literatur pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Karena hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh unsur waktu, maka data-data rangkaian waktu (*time series*) menjadi sumber data utama yang akan dianalisis.

I.7.3. Teknik Analisis

Pada penulisan ini pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis data yang ada adalah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dan analisis kuantitatif. Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan pengaruh Kebijakan Operasi Pasar Terbuka dalam hal ini adalah tingkat bunga SBI terhadap inflasi di Indonesia selama periode 1988 – 2003. Adapun saran yang digunakan adalah model regresi linier sederhana seperti di bawah ini :

$$I_f = \alpha + \beta r + e$$

Dimana : I_f = Inflasi
 α, β = Parameter
 r = Tingkat suku bunga SBI

Untuk melakukan pengujian dari hipotesis yang diambil, dilakukan uji T secara parsial dan uji F secara simultan dengan langkah :

$$H_0 : B = 0$$

$$H_1 : B \neq 0$$

Jika $B = 0$ berarti variabel independent tidak berpengaruh terhadap variabel dependent, sedangkan jika $B \neq 0$ berarti variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. Lalu untuk melihat keeratan hubungan antara variabel independent dan dependent, maka digunakan :

- a. Koefisien determinasi (r^2) untuk melihat hubungan satu arah, yaitu melihat seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent (dalam persen)

- b. Koefisien korelasi (r) untuk melihat hubungan dua arah, yaitu melihat seberapa besar keeratan hubungan antara variabel independent dan variabel dependent (dalam persen)

I.7.4. Batasan Variabel

Urgensi dari pembatasan variabel-variabel ini di latar belakang oleh adanya wawasan pengertian terminologis yang berbeda-beda mengenai variabel-variabel yang penulis bahas. Selain itu, pembatasan variabel ini juga bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam interpretasi dan juga untuk menciptakan kesamaan persepsi terhadap variabel-variabel yang di bahas. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, tingkat bunga dan kredit yang nantinya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat terutama inflasi (Roswita,2000:41).
2. Operasi Pasar Terbuka (OPT) adalah kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara menjual dan membeli surat-surat berharga pemerintah (SBI) sehingga akan mempengaruhi inflasi (Roswita,2000:43). Dalam hal ini, yang akan dilihat adalah pengaruh kenaikan atau penurunan tingkat suku bunga SBI dalam persentase.
3. Inflasi adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai kecenderungan dari harga-harga naik secara terus-menerus yang diukur dalam persentase

(Nopirin,1997:63). Dalam hal ini inflasi diukur berdasarkan :

$$\frac{IHK_t + IHK_t - 1}{IHK_t - 1} \cdot 100 \%$$

4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) bersifat penanaman dana sementara pihak bank (intervensi Bank Indonesia) yang belum tersalur lewat kredit kepada masyarakat. SBI akan menarik bagi dunia perbankan tergantung pada bunga yang dikenakan.
5. Tingkat bunga merupakan harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu yang dilihat dalam ukuran persentase.
6. M1 adalah uang kertas dan logam di tambah simpanan dalam bentuk rekenaing koran (demand deposit), biasanya diukur dengan jumlah nominal uang dan untuk melihat melihat pertumbuhanya digunakan persentase atau di formulasikan: $M1 = C + DD$
7. Pendapatan Nasioanal (GDP) adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang di roduksi selama periode tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di suatu negara (Case & Fair, 2002 : 23). Untuk melihat indikator GDP ini, digunakan persentase untuk pertumbuhannya.
8. GDP Deflator adalah rasio antara GDP nominal terhadap GDP riil.
9. Nilai tukar rupiah adalah nilai rupiah untuk mendapatkan 1 Dolar AS.

DAFTAR PUSTAKA

- AB. Roswita. 1999, *Seluk beluk Pasar Modal Indonesia*, Lembaga Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang
- AB. Roswita. 2000 , *Ekonomi Moneter : Teori, Masalah dan Kebijakan*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang
- Adiningsih, Sri. 1991. “Dilema kebijakan yang Menekan Laju Inflasi atau Tingkat Pengangguran”, Business News 5098, Jakarta, halaman 57-96
- Adityasuara, Mirza. 2004, *Rupiah dan Globalisasi Pasar Keuangan*, Kolom Finansial Harian Kompas, 23 Juni 2004, halaman 27
- Ali, Mayhud. 2002, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha : Pelosok Gelap di Balik Krisis dan Pertikaian Politik*, di terbitkan oleh PT Elex Media Komputiondo Kelompok Gramedia Jakarta
- Akhis, Reza, Fajar, Rizki. 2000, “Policy Rules untuk Pengendalian Inflasi Secara Forward Looking”, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol 3, No 3, Desember 2000. Bank Indonesia
- Amidi.2004, *Likuidasi ke enam dan API*, kolom opini, Harian Sumatera Ekspres, Kamis, 13 Mei 2004
- Anonim. 2001, *Kerangka Kebijakan Moneter Bank Indonesia*, makalah disampaikan pada pertemuan Bank Indonesia dengan Akademisi dan Wartawan Palembang, Tanggal 7 Juni 2001
- Anonim. 2000, *Krisis Ekonomi Indonesia dan Strategi Pemulihannya*, Bahan Sosialisasi APBN 2000, Badan Analisa dan Moneter DEPKEU jakarta
- Arifin, Sjamsul. 2001, *Perkembangan dan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, makalah disampaikan pada Diskusi Ekonomi dan Moneter di fakultas Ekonomi UNSRI Palembang
- Aulia, Telisa.2001, “ Agregat Moneter Sebagai Sasaran Antara Kebijakan Moneter di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol. 2 No. 1 , Kajian Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

- Bank Indonesia, Laporan Tahunan BI Palembang tahun 1990 – 2002
- Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2003, Palembang
- Belling & Totten. 1980, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan*, Rajawali Pers, Jakarta
- Boediono. 1996, *Ekonomi Moneter*, Edisi 3, BPFE Yogyakarta
- Boediono. 1982, *Ekonomi Makro*, Edisi ke empat, Yogyakarta, BPFE – UGM
- Budisusilo, Arief. 2001, *Menggugat IMF : Pergulatan Indonesia Bangkit dari Krisis*, PT Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Case & Fair. 2002, *Prinsip-prinsip Makro Ekonomi*, Edisi ke lima, PT Prenhallindo Jakarta
- Chandler.v.Lester. 1985, *Sistem Moneter Keuangan* (Terjemahan Sinungan. M), Bumi Aksara, Jakarta
- Deliamov. 1995, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djarwanto. 1985, *Statistik Induktif*, Edisi 4, BPFE Yogyakarta
- Djumala, Darmansjah. 1980, *Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berdikari Indonesia dengan Tabungan Nasional dalam Perspektif Sejarah Selama Periode Pra 1966 dan Post 1966 (Konsepsi, Realisasi dan Prospek Masa Depan)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan)
- Dumairy. 1996, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Djiwandono, Soedrajat. 2001, *Mengelola Bank Indonesia Dalam Masa Krisis*, Jakarta, LP2ES
- Djiwandono, Soedrajat. 2001, *Bergulat dengan Krisis dan Pemulihan Ekonomi Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Erman, Suherman. 2004, *Arsitektur Perbankan Indonesia*, Makalah di sampaikan pada Kuliah Umum Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Inderalaya, 6 Mei 2004

- Goeltom. Miranda. S, *Perkembangan Makroekonomi Indonesia dan Kebijakan Moneter Bank Indoensia*, Makalah disampaikan pada Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makasar, 20 Juli 2001
- Grossman, Gregory.1995, *Sistem-sistem Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta
- Hartadi, Sarwono. A. 2002, *Evaluasi Kinerja Ekonomi 2001 dan Prospek 2002 : Permasalahan, Tantangan dan Arah Kebijakan*, Disamapaikan dalam rangka Forum Diskusi Ekonomi Moneter dan Perbankan, Kerjasama Bank Indonesia Palembang dengan Universitas Sriwijaya, 20 Februari 2002.
- Ismail, Rizal. 1991, *Perkembangan Kebijakan Moneter Selama Periode Orde Baru*, Majalah Usahawan No 8 tahun XX Agustus, halaman 26 – 31
- Jhingan, M. L. 1988, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- JudiSeno, Rimsky. K. 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Khlawaty, Rimsky K. 2002, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lucket, Dudley. G. 1991, *Uang dan Perbankan*, Edisi ke 2, Penerbit Erlangga Jakarta
- Mankiw, Grefory. 1991, *Teori Makro Ekonomi*, Edisi keempat, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Mishkin, Fredric. S ____, *The Economics of Money, Banking, Financial Markets*, Third Edition, Terbitan Harper Collin Publisher
- Nopirin. 1997, *Ekonomi Moneter*, buku I, Edisi ke 4, BPFE Yogyakarta
- Rachbini. 2001, *Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasi Ekonomi*, PT Grasindo, Jakarta
- Sitorus, Tarmiden. 1998, *Suatu Pemikiran dalam Upaya Peningkatan Efektivitas Kebijakan Moneter di Indonesia*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Bank Indonesia, Jakarta
- Sukirno, Sadono. 1994, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi Kedua, PT Raja Grafindo Jakarta

- Sumodiningrat, Gunawan. 2001, *Ekonometrika Pengantar*, BPFE, Yogyakarta
- Supriyanto SE dan Agung F. Sapurna SE. 1999, *Utang Luar Negeri Indonesia*, Jakarta : Djambatan
- Tambunan , Tulus. 2003, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Todaro, Michale. P. 1997, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Keenam, Erlangga, Jakrta
- Usman, Ali. 2004, *Pengaruh Inflasi terhadap Velocity of Money di Indonesia*, Skripsi, fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasikan)
- Wijaya, Krisna. 2000, *Reformasi Perbankan Nasional catatan Kolom demo Kolom*, Penerbit harian Kompas, Jakarta
- _____, *RI – IMF Hasilkan Memorandum Tambahan*, harian kompas, 4 April 1998, hal 12
- _____, ([http:// Kompas.com](http://Kompas.com), diakses 30 januari 2005)